

Peran Wanita dalam Pandangan Politik: Analisis Ayat-Ayat tentang Peran Wanita dalam Q.S. At-Taubah: 71 dan Q.S An-Nisa 34

Annisa Inggria¹, Marpria Priwulan² Armaida Siregar³, Sarah Kumala B.Bara⁴,
Nina Sari Siregar⁵, Mardian Idris Harahap⁶

^{1,2,3,4,5}Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

⁶Dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

anninggria07@gmail.com¹, wulankisaran427@gmail.com²,

armasiregar91@gmail.com³, sarahkumala@gmail.com⁴,

ninasarisiregar512@gmail.com⁵, mardianidris@uinsu.ac.id⁶

ABSTRACT

This article was written with the aim of analyzing the verses of the Koran relating to leadership and understanding the role of women according to Q.S. An-Nisa verse 34. In this study the focus that will be discussed is the history of women in the world of leadership regarding how leadership roles in the political field are not only filled by men but can also be carried out by women. Writing this article uses qualitative methods and techniques in collecting data with a library-based approach or library research, namely explaining the material that will be discussed by collecting several library sources, both primary and secondary. Primary literature sources referred to are books that discuss women's role participation in politics and secondary literature sources used are journals that are relevant to key discussions about the role of women in leadership both according to the view of the Al-Qur'an and also according to political views. The findings that the author got from writing this article are first, in the history of Islamic civilization there has been a role for women in the world of political leadership such as Queen Bilqis from Negri Saba' and Syajaratud Dur who was the sultan of Egypt. Second, based on the analysis of Surah At-Taubah verse 71, women can also have the same role in the field of leadership, not just men. Here the two can work together together.

Key words: role of women, politics, At-Taubah, awliyah, An-Nisa

ABSTRAK

Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kepemimpinan dan memahami peran wanita menurut Q.S. An-Nisa ayat 34. Dalam kajian ini fokus yang akan dibahas yaitu sejarah wanita dalam dunia kepemimpinan tentang bagaimana peran kepemimpinan dalam bidang politik bukan hanya diisi oleh kaum pria tetapi dapat dijalankan juga oleh kaum wanita. Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif dan teknik dalam mengumpulkan data dengan pendekatan yang berbasis kepastakaan atau *library research* yaitu memaparkan bahan materi yang akan dibahas dengan mengumpulkan beberapa sumber kepastakaan baik yang bersifat primer maupun yang bersifat sekunder. Sumber kepastakaan primer yang dirujuk berupa buku-buku yang membahas mengenai partisipasi peran perempuan dalam politik dan sumber kepastakaan sekunder yang digunakan berupa jurnal-jurnal yang relevan dengan kunci pembahasan tentang bagaimana peran perempuan dalam kepemimpinan baik menurut pandangan Al-Qur'an juga menurut pandangan politiknya. Adapun hasil temuan yang penulis dapat dari penulisan artikel ini yaitu pertama, dalam sejarah peradaban Islam sudah ada peran

perempuan dalam dunia kepemimpinan politik seperti Ratu Bilqis dari Negri Saba' dan Syajaratud Dur yang merupakan sultan Mesir. Kedua, berdasarkan analisis dari surah At-Taubah ayat 71 perempuan juga bisa memiliki peran yang sama dalam bidang kepemimpinan tidak hanya kaum laki-laki saja. Di sini keduanya dapat bersama dalam bekerja sama.

Kata kunci: peran wanita, politik, At-Taubah, *awliyah*, An-Nisa

PENDAHULUAN

Peran merupakan unsur digerakkan mulai kedudukannya atau situasi seseorang. Apabila seseorang mengoperasikan hak lalu tanggung jawabnya sebanding dengan kedudukannya, jadi itu dikatakan sudah mengikuti posisinya. Secara sosial, peran menggambarkan karakteristik yang diakibatkan oleh kondisi dari pemenuhan hak serta tanggung jawab, disebut juga situasi yang tidak jelas. Situasi adalah kedudukan orang yang tidak bergantung pada identitasnya. Nilai posisi seorang perempuan dalam pemerintahan sudah menjadi motto umum yang menggunakan partai politik. Dominan pria dalam struktur kehidupan seseorang sepanjang sejarah menyebabkan wanita dianggap seperti warga kelas dua yang kurang dihargai dari pada pria. Pengaruhnya sangat penting dalam kehidupan. Suatu masyarakat di mana perempuan sering kali ditempatkan di bawah prioritas laki-laki dan hanya dipandang sebagai pelengkap, yang hadir untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan seorang pria.

Ketika kita berbicara tentang perempuan, selalu tentang peran dan posisinya melalui komunitas, khususnya di urusan pemerintahan. Sedihnya, peranan lalu kedudukan wanita sering kali melihat pelecehan lalu dunia pemerintahan. Padahal, persoalan fungsi dan status wanita di kehidupan bermasyarakat adalah komponen dari *human right* di mana menjadi hak semua orang. Ironisnya, banyak perempuan yang tidak begitu memahami hak-haknya. Diskriminasi gender masih terjadi dalam politik Indonesia. Perlu dicatat bahwa sebagian besar wanita Indonesia tetap belum terlibat aktif dalam diskusi pemerintahan di mana memiliki peran yang terbatas dalam pengambilan keputusan. Bahkan ada prasangka bahwa perempuan tidak layak berpartisipasi dalam politik.

Partisipasi perempuan dalam mencakup komitmen terhadap pembinaan wanita, melatih pemerintahan wanita (kesadaran sosial akan hak asasi manusia dan pemerintahan), ikut serta sebagaimana pilihan dan kandidat terpilih, representasi wanita sesuai jabatan pemerintahan mudah dikategorikan ke dalam berbagai bidang.¹

Menurut Canto dan Bernay (1998: 997), serta perannya wanita dalam organisasi pemerintahan bukan lebih dari sekedar impian perempuan untuk memasuki kancah politik. Mereka tidak puas hanya dengan menjalankan tugas-tugas administratif, namun berusaha untuk menaiki jenjang hierarki partai menuju posisi kepemimpinan di mana mereka bertanggung jawab tidak hanya untuk memperluas pengetahuan mereka, tetapi juga untuk memperluas pengetahuan mereka tentang peran dan komunitas.

¹ Tegar Putra Munggaran, Peran dan pengaruh Perempuan dalam dinamika politik di Indonesia, (Depok: *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 4, No. 7), 2023.

Pada prinsipnya kontribusi pemerintahan wanita merupakan aktivitas sukarelawan yang dilakukan oleh wanita, mereka yang tergabung dalam komunal Women in Politics. Kaku tersebut terdiri dari beberapa elemen atau komponen, di antaranya pengamat pemerintahan, aktivisme, profesor, anggotanya undang-undang, dan pengurus organisasi. Mereka berpartisipasi secara instan atau tidak instan melalui pemilihan penguasa. Secara umum terlibat perempuan diperlukan melalui semua bidang kehidupan, termasuk politik, karena wanita merupakan punya dan kewajiban untuk terlibat dan mengambil bagian secara aktivasi. Oleh ketika itu, terus terjadi perjuangan keras yang dikerjakan pada wanita di semua tingkatan jadi memengaruhi hasil politik, khususnya di bidang politik.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini merealisasikan metode kualitatif pada karakteristik lebih mengutamakan aspek deskriptif dari data-data yang didapatkan dari lapangan. Metode ini memiliki ciri khas dalam menganalisis data lebih mendalam dari yang terlihat pada kenyataannya. penelitian ini menggunakan pendekatan dalam pengumpulan data berbasis *library research* atau kepustakaan dengan mencari data penelitian yang relevan terhadap pembahasan. Adapun data primer yang digunakan berupa beberapa buku yang membahas tentang peran wanita dalam pandangan politik. Dan data sekunder yang digunakan berupa jurnal-jurnal dan artikel yang terkait. Pencarian data penelitian menggunakan database google scholar dengan kata kunci peran wanita dalam pandangan politik dan ayat-ayat mengenai peran wanita dalam bidang kepemimpinan politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Perempuan dan Politik

1. Pengertian Perempuan

Apresiasi arti perempuan memang tidak dapat lepas dari permasalahan fisik serta mental. Baik segi fisik didasarkan atas susunan biologis, instrumen, dan perkembangan unsur-unsur kimia suatu organisme. Pada saat yang sama, konteks psikologis dilandaskan dominan ke karakteristik, maskulinitas atau feminitas. Perempuan, dalam konteks psikologis atau seksual, dimaksudkan menjadi ciri-ciri feminin.

Dalam pengertian fisik, Perempuan merupakan ciri gender dengan alat pembiakan, yakni rahim, sel telur, dan payudara, yang memungkinkan perempuan untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Meskipun demikian, istilah "wanita" biasanya mengacu pada wanita dewasa.

Perempuan asal kata bahasa Arab *al-Mar'ah*, bentuk jamak dari *an-nisaa'* sama dengan istri, perempuan dewasa atau anak perempuan dewasa yaitu lawan jenis laki-laki. Kata *an-nisaa'* berarti perempuan, sesuai dengan kata Arab *al-Rijal* yang berarti laki-laki. Padanan bahasa Inggrisnya adalah perempuan (jamak perempuan) sebagai lawan dari laki-laki.

Bersandarkan penguraian tersebut, bisa dirangkumkan maka perempuan ialah wanita yang memiliki daya tarik kecantikan, mempunyai karakter keibuan, serta telah mencapai usia dewasa, memiliki kematangan emosional dan efektif, maupun mempunyai karakteristik khusus wanita.

2. Pengertian Politik

The Word of “politik” bersumber pada kata Yunani polis, *politicos* (warga negara), *politicos* (kewarganegaraan). Di kota-kota Yunani, manusia berkomunikasi timbal balik tujuan meraih kebahagiaan untuk hidup mereka (baik menurut Aristoteles). Ketika seseorang berupaya untuk memastikan posisi mereka sebagai bangsa, mencapai ketentraman individual dengan keperluan hidup yang tersedia, maupun membuat orang-orang mendapat pandangan tersebut, mereka terlibat dalam aktivitas yang disebut politik.

Secara umum, politik merupakan upaya menciptakan beberapa aturan yang disetujui bagi sejumlah penduduk negara guna memandu rakyat menuju jiwa berdekatan dengan seimbang. Mengejar semangat dan sehat melibatkan banyak aktivitas, tergolong definisi tujuan yang sistematis dan cara untuk mencapainya.

Pengertian politik menurut Gabriel A. Almond dkk., yaitu tindakan yang berkaitan dengan pengendalian pengambilan keputusan publik pada suatu masyarakat di suatu wilayah tertentu, di mana pengendalian tersebut didukung dengan cara yang berkaraktr dogmatis (yang sah secara hukum) maupun yang berkaraktr menekan (kuat). Politik membentuk atas pemakaian alat-alat otoriter serta paksaan, siapapun yang berwenang memakainya serta untuk maksud bagaimana.

Pemimpin Perempuan dalam Sejarah

1. Ratu Balqis dari Kerajaan Saba (Sekarang Yaman)

Ratu Balqis ialah raja Singgahsana Saba, yang mana saat ini berposisi di Yaman, barat daya Semenanjung Arab. Kabarnya, Singgahsana Saba bangkit dari tahun 2000 SM sampai abad ke-8 SM, dan penduduknya tidak menyembah Allah tetapi patung berhala. Pemimpin yang menghormati matahari menjadi Ratu Balqis. Al-Qur'an mengecap Ratu Balqis laksana pemimpin yang kafir pada awalnya, hingga untuk akhirnya dia beriman di bawah mentoring Nabi Sulaiman. Dini sebelumnya beriman, Ratu Balqis merupakan pemimpin yang berpengaruh, kuat, dan bermusyawarah, dan begitu juga setelah beriman bersama Nabi Sulaiman. Oleh karena itu, kepemimpinan memiliki peran fundamental pada pembentukan Rakyat dalam *Baldatun tayyibatun wa robbun ghofur*, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai Negeri Saba', suatu singgahsana di Yaman, Arab Selatan, pada abad ke-8 SM. Negeri Saba' sangat subur dengan bendungan Ma'rib yang besar. Lokasinya yang strategis menjadikannya wadah penjualan internasional serta kemampuan militer yang tangguh. Negeri Saba' terkenal dengan peradabannya yang tinggi. Ratu Balqis adalah penguasanya, dan dia memiliki tahta yang mewah dan kaya terhadap apapun instrumen perseteruannya dan

hanya dipunyai oleh kerajaan-kerajaan besar. Selain memiliki tahta yang megah, Balqis juga pandai memimpin.²

Terhadap tradisi Arab, ada dasar yang kuat untuk cerita tentang bagaimana Ratu Balqis memimpin. Dalam beberapa hadist, Balqis disebut sebagai Balkis binti Shurahbil. Ayahnya adalah seorang sultan yang terkenal dan mempunyai posisi penting. Balqis memiliki segala sesuatu yang dia butuhkan untuk mengaktualkan kewenangannya abadi dan kuat. Misalnya, bentala yang makmur, rakyat yang setia, militer yang kuat, dan kekuasaan yang seimbang. Selain itu, bentuknya menjadi seorang pemimpin yang bijak dan mencintai perdamaian.³

Ciri pemerintahan pada masa Ratu Balqis

Di dalam Al-Qur'an terdapat cerita tentang Ratu Balqis digambarkan seperti Arsyun adim, artinya kekuasaan yang melambangkan kebesaran satu kerajaan. Menggunakan kalimat Arsyu'n adhim menunjukkan tentang Ratu Balqis yang mempunyai sifat yang independen, sehingga terwujudlah sebuah pemerintahan yang kokoh dan sangat megah. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ciri untuk mewujudkan pemerintahan yang baik sebagai perempuan adalah menjadi wanita yang matang, harus mempunyai kematangan emosi, dewasa, independen dan taat akan spiritual (agama). Kisah itu menggambarkan bahwa Al-Qur'an sangat mengapresiasi seorang wanita yang bisa dan sanggup memimpin dan memerintah. Sampai saat ini tidak ada ditemukan dalam kebanyakan tafsir mulai dari dahulu hingga tafsir-tafsir modern yang sekarang kita baca, yang memperlihatkan ketidaksetujuannya dengan kisah Ratu Balqis tersebut.

Inilah apresiasi Al-Qur'an terhadap Ratu Balqis, juga karena sebenarnya ia memiliki pesona wanita yang mempunyai tahta meski di sekitarnya hampir semua sosok pria. Di sini penulis juga mendapatkan nilai kualitas yang terkandung dalam kualitas kepemimpinan wanita. Ciri-ciri kepemilikan Ratu Balqis bisa dianalisis antara lain:⁴

a. Demokrasi

Ratu Balqis menunjukkan kualitas kewibawaan yang mengapresiasi gagasan serta penilaian. Ratu Balqis menerima secarik kertas atas Nabi Sulaiman AS. Balqis memanggil beberapa pengacara serta orang-orang terdekatnya demi memohon nasihat yang akurat mengenai tindakan apa selanjutnya yang harus diambilnya menyikapi surat Nabi Sulaiman AS. Perihal tersebut mengarahkan sesungguhnya Balqis bukanlah atasan yang otonom. Setelah berbicara dengan para penasihatnya dan orang-orang terdekatnya, mereka akhirnya

² Via Susanti, *Model Kepemimpinan Bilqis Dalam Al-Qur'an*, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2019, hal 2-3.

³ Sakdiah, Karakteristik Kepemimpinan Ratu Balqis Dalam Al-Qur'an, *Jurnal Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak* Volume 12. No. 2 Juni – Desember 2023, hal 3.

⁴ *Ibid.*, hal. 6-15.

memutuskan untuk siap mengerjakan segala keandilannya. Keandilannya Ratu Balqis setelah memperhitungkan segala aspek serta juga memperlihatkan bacaan secarik kertas itu serta metode pendeklamasiannya, Ratu Balqis belum berminat untuk bertarung seperti yang tersirat atas balasan pengacarannya. Setelah Ratu Balqis mengingatkannya akan besarnya ancaman perang, ia berkata akan membalas surat Nabi Sulaiman dan mengiriminya hadiah. Jadi, secara Ratu Balqis, orang-orang terus memperlambat jangka waktu demi memutuskan adakah akan berperang kepada tentara Sulaiman atau berdamai. Sikap tersebut menunjukkan bahwa Ratu Balqis mempunyai keunggulan analisis mengatur keadaan mendesak dengan telaten dan mampu mengendalikan keadaan mendesak pada negaranya.

b. Bijaksana

Kepemimpinannya mencerminkan kebijaksanaan dalam mengatur urusan Negara, mencari nasihat dari instansi pemerintah sebelum mengambil keputusan, melakukan negosiasi dan memperhatikannya sebelum mengambil keputusan. Kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat. Keistimewaannya adalah dia sangat memperhatikan perdamaian dan kemakmuran masyarakatnya ketika dia membuat kebijakan terburu-buru bahkan memutuskan untuk *war* (perang). Bahkan ia menjaga hubungan negaranya dengan negara lain secara bijak, pintar, dan berwibawa.

c. Cerdas

Keterampilan diplomatis dalam dunia perpolitikan disebut-sebut seperti ciri yang harus dijaga dalam pemerintahan. Ratu Balqis cukup pintar menyelesaikan krisis yang dialami negaranya tanpa mengalami kekalahan. Ia mengelola kesultannya menjadi bagus serta memformulasikan trik yang tepat serta istikamah menerapkannya seperti mengendalikan hubungan luar negeri. Kelakuan di atas memperlihatkan sesungguhnya watak Ratu Balqis yang pintar serta memegang kearifan politik, Ratu Balqis merupakan contoh pertama sosok perempuan berpengalaman di dunia politik, yang lebih baik dari pemimpin lainnya karena mampu menyelesaikan permasalahan luar negeri yang sulit. Mampu menyelesaikan permasalahan politik bernuansa keagamaan bersama sultan terbesar pada masanya yakni Nabi Sulaiman AS. Kecepatan pengambilan keputusan, kecergasan dan ketelitian menunjukkan pengambilan keputusan yang bijaksana, hati-hati, dan menyeluruh.

d. Cinta yang damai

Memperlihatkan cinta kasih maupun kemauan demi melindungi pemufakatan. Memohon penilikan serta nasihat atas para pejabat sebelum mengambil keputusan menunjukkan sikap hati-hati terhadap pemeliharaan perdamaian. Dan dapatkan masukan sebelum bertindak. Mengakui perdamaian, mengevaluasi kondisi yang mendorong

perdamaian, dan menjaga stabilitas dan keamanan dalam kondisi nyaman agar tidak memilih bertarung terhadap Sultan Sulaiman.

e. Brilian menggunakan media (Burung Hud-Hud)

Hudhud merupakan sarana cerdas untuk menyampaikan kabar gembira terhadap Nabi Sulaiman serta Ratu Balqis serta untuk mengetahui dan mengumpulkan informasi akurat mengenai keadaan khususnya kekebalan saingan. Burung hudhud bisa dikatakan menjadi saluran penyampaian info terkini semakin mudah seiring dengan kemajuan teknologi. Jika dulu burung hudhud mesti melayang demi menemukan info nyata, kini peran hudhud sudah tergantikan oleh alat elektronik. Kepentingan terhadap alat sangatlah penting untuk para atasan. Sebab tanpa media, sulit bagi pemimpin untuk menerima pemberitaan dari komunitas yang dipimpinnya. Selain amanat Nabi Sulaiman demi menemukan akurasi info burung hudhud, ada pun amanat demi menemukan akurasi info awal mula menetapkan sesuatu. Soliter atasan belum bisa begitu saja memperoleh info dari siapa pun—termasuk media—jika dia tidak mengetahui kebenarannya. Bisa ditiru dengan gambaran Nabi Sulaiman. Konsep burung Hudhud masa kini bisa dimaksudkan menjadi wahana ataupun teknologi elektronik yang memungkinkan pesan dikirim terhadap langkah panjang. Untuk perihal tersebut, ada ikatan yang sungguh dekat jeda alat dan atasan (untuk pria serta wanita). Atasan mesti mampu menggunakan wahana untuk memahami situasi warga sosial sebagai keseluruhan. Masalahnya karena tuntutan penggunaan teknologi yang semakin modern, keberadaan teknologi sangat penting bagi pengemudi. Semakin sering seorang pendiri berkomunikasi bantuan teknologi, melebihi maju juga bidang di mana dikelolanya di berbagai elemen kehidupan Contohnya adalah setelah burung hudhud menyampaikan surat kepada Nabi Sulaiman lalu penentuan Ratu Balqis, yang berubah menjadi contoh bagi para kepemimpinan. Sikap nilai Ratu Balqis melihat jelas ketika ia memilih untuk tidak bertempur dan mengeluarkan hadiah ke arah Nabi Sulaiman. Beberapa dari ahli tafsir memberikan penjelasan bahwa pemberian manfaat dari Ratu Balqis merupakan bentuk perdamaian kirim pemimpin. Untungnya, Nabi Sulaiman bukan menyetujui benda tersebut. Terjadi contoh bagi para pemimpin bahwa mereka tidak boleh terlibat dalam praktik suap dalam kondisi apapun. Jangan memberi dan jangan menerima suap. Menerima suap akan menyebabkan rasa tidak yakin terhadap kepemimpinan. Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis merupakan pengingat bagi semua pemimpin untuk waspada dengan keuangan benda yang tidak dimilikinya mengingat dapat berakibat fatal. Pertemuan Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis dimulai ketika jin menyembunyikan dan menyamarkan singgasana Ratu Balqis di dalam sebuah cerita yang diceritakan oleh seorang yang memahami kitab. Meskipun istana disamarkan, Ratu Balqis tetap dapat mengenalinya tanpa

keraguan. Hal ini menunjukkan bahwa Ratu Balqis sangat berhati-hati dengan harta miliknya dan jawaban terhadap apa yang dimilikinya.

- f. Kesetaraan laki-laki dan perempuan yang diberikan kelebihan dalam memimpin Negara

Ia diberi semua yang mungkin menggabungkan semua keunggulan, kekuatan, dan kemampuannya sebagai raja. Dipersembahkan untuk Ratu Balqis. Dalam cerita Ratu Balqis dan Nabi Sulaiman, kita dapat melihat jelas makna yang terkandung di dalamnya. merupakan dua kerajaan kaya raya yang hidup pada masa itu, sama-sama terdapat istana yang membanggakan dan pasukan yang kencang. Tetapi keduanya mempunyai filosofi atau keyakinan religius yang berbeda, konon Ratu Balqis adalah seorang penyembah cahaya matahari dan Nabi Sulaiman adalah seorang pembawa instruksi Allah. Kedua cerita tersebut menunjukkan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kemampuannya menjadi pemimpin. Nabi Sulaiman adalah raja yang cerdas terhadap semua pasukannya.

Seorang pemimpin perempuan yang digambarkan sebagai diplomatis, bertanggung jawab, teliti, cerdas, dan penuh cinta damai. Hal ini menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat memimpin dengan baik. Seorang wanita yang ingin menjadi pemimpin harus memiliki kedewasaan. Media atau teknologi dapat dimanfaatkan untuk memahami kebutuhan masyarakat yang dipimpinnya. Laki-laki pun bisa mempelajari kepemimpinan dari contoh Nabi Sulaiman, seorang raja yang dekat dengan prajuritnya. Penting untuk berhati-hati dalam menerima hadiah atau suap dari sesama pemimpin. Pesan ini bertujuan untuk mendukung laki-laki dan perempuan agar sukses dalam kepemimpinan mereka.

Kisah Ratu Balqis menunjukkan bahwa ayat tersebut menggambarkan sifat-sifat kepemimpinan yang dimilikinya, seperti bijaksana dan demokratis, memperhatikan kesejahteraan rakyat, menjaga perdamaian, menolak suap, cerdas, teliti, dan memiliki kemampuan yang merupakan keunggulan manusia. Penerimaan seorang pemimpin dapat dilihat dari dukungan politis, keluarga, dan masyarakatnya, yang mencerminkan sejauh mana kemampuannya diterima oleh orang-orang di sekelilingnya.⁵

2. Syajaratud Dur (Seorang Sultan Mesir)

Syajaratud Dur merupakan pelopor wanita perdana pada Tarikh Islam yang berjaya memangku jabatan dalam wewenang. Ini berlaku di Mesir pada era pertama Masehi. Saat suaminya wafat, dia hanya berusaha memimpin. Dia tidak memberi tahu orang lain tentang meninggalnya suaminya.⁶

⁵ *Ibid*, hal 6-15.

⁶ Rusnila, *Perempuan Berpolitik dalam Perspektif islam*, Raheema: jurnal studi gender dan anak, vol.1 no.1 (2014), hal. 4.

Istri Raja berjaya melawan gempuran rombongan Salib serta lebih-lebih tercapai mengenyahkan pasukan tersebut dari Mesir dengan bantuan seorang anaknya. Dia dikuasai oleh ambisi dan seruan *syaitan* demi mempertahankan pretensi kewenangan. Lalu dia menghabiskan anaknya.

Perkiraan waktu ke depan, saat rahasianya alhasil terkuak, dia langsung kawin lagi dan membuat suaminya menjadi baginda. Namun, ia tidak senang atas posisi perdananya menjadi pasangan seorang baginda, maka, dia lagi-lagi menewaskannya. Akan tetapi, tampaknya Allah SWT tiada ingin lagi menahan keburukan pribadinya yang berlebihan. Rahsianya telah terbongkar, dan masyarakat tidak bisa lagi memaafkannya. Dia lalu dipecat dari tahtanya serta mesti bertanggung jawab atas tindakannya semenjak tersebut.

Perempuan dalam Kosmopolitan Islam

Untuk mencapai kerja sama, laki-laki dan perempuan harus saling membantu pada bermacam jurusan urusan, terlebih lagi dalam berumah tangga, di mana mereka memiliki tanggung jawab yang sama untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Suatu ini menunjukkan kalau Islam adalah agama yang *rahmatan lil'alamin* dan berwawasan luas. Individu seorang pria maupun wanita berfungsi terhadap kemanfaatan insan tersebut secara pribadi. Tujuan utama agama Islam ialah memperbaiki umat manusia, seperti yang dikatakan Rasulullah, "*Aku ini diangkat menjadi rasul semata-mata untuk memperbaiki budi akhlak yang mulia.*"

Firman Allah SWT di dalam surah At-Taubah ayat 71

الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ عَنِ الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ بِأَمْرٍ ۖ بَعْضُ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ
حَكِيمٍ عَزِيزٌ إِنَّ ۗ اللَّهُ سَيَرْحَمُهُمْ أَوْلِيَاءَ ۗ وَرَسُولُهُ ۗ وَاللَّهُ يُطِيعُونَ الرَّكْعَةَ وَيُؤْتُونَ

Artinya: *Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*⁷

Secara umum ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara lelaki dan perempuan untuk berbagai bidang kehidupan yang ditunjukkan dengan kalimat "menyuruh mengerjakan yang makruf dan mencegah yang munkar. Pengertian kata *awliya'* mencakup kerja sama, bantuan, dan penguasaan; sedangkan pengertian yang terkandung dalam frase "menyuruh mengerjakan yang makruf" mencakup segala segi kebaikan dan perbaikan kehidupan, termasuk memberikan nasihat atau kritik kepada penguasa, sehingga setiap lelaki dan perempuan Muslim hendaknya mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mampu melihat dan memberi saran atau nasihat untuk berbagai bidang kehidupan.⁸

⁷ Al-Qur'an, At-Taubah : 71.

⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. ke 13, (Bandung: Mizan, 1996), h. 275

Azyumardi Azra berpendapat kata *awliya'* dalam ayat di atas, pengertiannya mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan, sedangkan menyuruh mengerjakan pekerjaan yang *ma'ruf* mencakup segala segi kebaikan termasuk memberi masukan dan kritik terhadap penguasa. Tidak ditemukan dalam ayat Al-Qur'an yang melarang perempuan aktif dalam kegiatan politik dan kemasyarakatan, sebaliknya sejarah menunjukkan betapa kaum perempuan dipermulaan Islam banyak yang pernah memegang peranan penting.⁹

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Muhammad Quraish Shihab, pengertian kata dari *awliya'* mencakup kerja sama, bantuan, dan penguasaan, sedangkan pengertian yang terkandung "menyuruh mengerjakan yang *makruf*" mencakup segala segi kebaikan dan perbaikan kehidupan, termasuk memberikan nasihat atau kritik kepada penguasa, sehingga setiap lelaki dan perempuan Muslim hendaknya mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mampu melihat dan memberi saran atau nasihat untuk berbagai bidang kehidupan.¹⁰

Oleh karena itu, makna kata *awliya'* (atasan) tidak cuma dirujuk untuk laki-laki, namun juga pada laki-laki maupun perempuan yang bekerja sama, membantu, memelihara, mengasuh, dan menguasai satu sama lain. Sementara yang *ma'ruf* pada ayat ini menyerkap aspek kelebihan dalam perubahan pola berkehidupan. Derajat wanita di rumah tangga tiada mesti sama dengan para laki-laki demi menjaga kemanisan kekeluargaan. Di sini, menjadi suami dan kepala rumah tangga, laki-laki tetap memegang posisi keefektifan famili.

Peran pentingnya ialah menjadi pengatur, berfungsi menjadi pengawal, mencari rezeki, mentor, serta pengarah keluarganya. Sementara istri bertindak sebagai pemimpin dan bertanggung jawab kepada suaminya. Selanjutnya, QS an Nisa (4): 34 menyatakan:

حَفِظَتْ قَبِيَّتٌ فَالْصَّالِحَاتُ ۖ أَمْوَالُهُمْ مِنْ أَنْفُقِهِمْ وَأَبْمَا بَعْضٍ عَلَى بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا أَلْيَسَاءَ عَلَى قَوْمٍ الرِّجَالِ تَتَّبِعُوا فَلَا أَطَعْتُمْ فَإِنَّ ۖ وَأَضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي وَأَهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نُسُورَهُنَّ تَخَافُونَ وَالَّتِي ۖ اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْغَيْبِ كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ سَبِيلًا عَلَيْهِنَّ

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*¹¹

Sebagaimana dinyatakan dalam hadis, "Sesungguhnya perempuan menjadi teman (pendamping/saudara kandung) bagi para laki-laki" (HR Ahmad, Turmidzi, dan Abu Daud), perempuan dianggap sebagai mitra pendamping pria (suami).

⁹ Azyumardi Azra, *Kajian Tematik al-Qur'an Tentang Kemasyarakatan*, (Bandung: Angkasa, 2008), h. 254.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan), h. 275.

¹¹ Al-Qur'an, An-Nisa : 34.

Dibenarkan kalau jihad yang diharuskan untuk laki-laki tidaklah keharusan untuk wanita; terhadap kalimat beda, pola jihad berbeda. Melaksanakan ibadah haji adalah salah satu bentuk jihad perempuan. Terdapat Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, apakah kaum perempuan wajib melakukan jihad?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya, jihad yang tidak mengandung pertempuran, yaitu (melaksanakan) Ibadah Haji dan Umrah." Berpartisipasi dalam hijrah fisik serta jiwa bersama Nabi. kehampaan dalam keluarga, harta, dan tanah kelahiran.¹²

Pada masa Khulafaur Rasyidin (ummahat al-mu min), perempuan ikut serta dalam: menghadapi orang-orang munafik, melawan kezaliman dan melarikan diri dari penganiayaan. Sebagaimana tercantum dalam Q.S Al-Hujurat (49): 13:

عَلِيمٌ اللَّهُ إِنَّ اتَّقُوا اللَّهَ عِنْدَ أَعْرَابِكُمْ إِنَّ تَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَأُنْثَى ذَكَرٍ مِنْ خُلُقَاتِكُمْ إِنَّا النَّاسُ يَا أَيُّهَا خَيْرٌ

Artinya: *Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui Maha Teliti.*

Tidak ada perbedaan antara gender, ras, atau etnis dalam hal ini. Menentukan positioning strategis, posisi kunci pemerintahan dan keterlibatan di berbagai bidang. Yang terlihat adalah derajat ketakwaannya. Menurut (Adabun Mar'ah: 1976: 5-6), Allah SWT menciptakan wanita untuk menyempurnakan sunnah dan aturan-aturannya seperti saling mencintai, menyayangi, saling memanfaatkan, dan satu sama lain.

Menurut Noorjannah (2014 Hal 10) perempuan adalah penyeimbang iklim politik, berbagi tugas untuk membawa kesejahteraan bagi dunia, layaknya khalifah di muka bumi. Wanita mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki untuk memasuki ranah penunjang kehidupan. Perempuan perlu membuat politik Indonesia bersih, termasuk politik. Politik Integritas adalah politik yang berupaya membangun penghormatan terhadap masalah (kesejahteraan), kekuatan nasional, moral yang tinggi, dan akhlak atau harkat dan martabat yang kuat.¹³

Peran Wanita Muslimah dalam Kajian Politik

Hazna Alifah berpendapat bahwa peran wanita di bidang politik dalam Islam sangat berbeda dengan politik Sekularisme. Tujuan politik Islam bukan sekadar meraih kekuasaan, bersenang-senang, akan tetapi sebagai pengurus urusan umat, yang berarti memastikan seluruh persoalan umat diselesaikan sesuai aturan Allah. Politik adalah hak dan kewajiban seluruh umat Islam, termasuk perempuan.¹⁴

Politik yang ada dalam Islam dikenal dengan *as-siyasah* dan merupakan segala kegiatan manusia yang berkaitan dengan penyelesaian segala jenis konflik dan penciptaan keamanan dalam masyarakat. Sementara itu, pemimpin adalah orang yang mempunyai keterampilan dan kelebihan, terutama keterampilan yang unggul

¹² *Ibid.*, hal 5

¹³ *Ibid.*, hal 6.

¹⁴ Faizatul. R, *Peran politik Perempuan dalam islam*, 2014.

dalam bidang tertentu, yang membuatnya mampu mengajak orang lain supaya bersatu dan kebersamai banyak aktivitas untuk menghasilkan banyak pencapaian. Dari sini, perempuan diizinkan untuk menjadi pemimpin organisasi, perusahaan, atau bahkan negara dalam perspektif Islam.

Dalam bukunya *al-Huquq al-Siyasah li al-mar'ah fi al-Islam*, Abd. Hamid Al-Anshori menyatakan, "Sebagian ulama Islam Kontemporer berpendapat bahwa agama Islam tidak menghalangi hak-hak politik perempuan secara mutlak, persoalannya hanyalah pada masalah sosial politik, oleh sebab itu dalam menganalisis masalah ini harus disesuaikan dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi."

Menurut Mustofa as-Siba'i dalam bukunya *al-Mar'ah Baina al-Fiqhi wa al-Qonun* (1963: 40), ada beberapa fatwa dari sebagian ulama yang memberikan ruang penuh kepada perempuan untuk menjadi pemimpin Negara dan khilafah tanpa adanya.¹⁵

1. Partisipasi Politik Perempuan

Secara etimologis, partisipasi mengacu pada keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam kegiatan politik, seperti pemilihan pemimpin dan akan terpengaruh pada aturan negara, baik *offline* ataupun *online*. Menurut Huntington dan Nelson (1990), kontribusi politik mencakup aktivitas WNI bertujuan memengaruhi keputusan pemerintah secara pribadi.

Topik perempuan dan politik sangat menarik karena dari sudut pandang feminisme radikal, ada transformasi besar peran perempuan dari lingkup domestik ke publik yang dikenal sebagai kesetaraan gender. Sudah saatnya perspektif gender diintegrasikan ke semua aspek kehidupan, khususnya dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah. Sejauh ini, di Indonesia aktivitas politik sosial sering dinampakkan melalui sudut pandang laki-laki, yang membuat perempuan terpinggirkan dan dianggap belum cukup bisa terlibat dikarenakan politik dipandang sebagai ranah yang keras dan tidak bersih. Akan tetapi, perempuan dalam berpolitik berbeda dari laki-laki yang berpolitik. Terlibatnya perempuan dalam berpolitik sebenarnya tidak termasuk sesuatu yang baru. Pada masa berjuangnya perempuan, peranan mereka pada pembangunan sudah mencapai tingkat kemajuan yang tinggi, termasuk di bagian ekonomi, pendidikan, pemerintahan, dan lembaga negara.

Membahas partisipasi politik wanita tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan mengenai peranan berpolitik dalam pengetahuan politik. Menurut Mely G. Tan (1992, dalam Yulfita, 1995: 1), partisipasi politik dapat dibedakan menjadi 2 bagian: sempit dan luas. Menurut pengertian sempit, peranan berpolitik adalah keterlibatan dalam politik praktis dan aktivitas terkait, sedangkan dalam pengertian luas, mencakup keterlibatan aktif pada aktivitas yang melibatkan kemampuan, peluang, dan kehendak dalam mengambil suatu keputusan penting yang mempengaruhi banyak orang.

¹⁵ bangbudi.blog.ugm.ac.id/2012/11/23/wanita-dan-kepemimpinan-politik-dalam-islam/. Diakses tanggal 07-11-2014

Dalam praktiknya, kontribusi politik perempuan harus didasarkan pada kehendak yang sukarela, bebas, sadar, dan aktif. Ini mencerminkan keadaan di mana perorangan dalam masyarakat mengarahkan kegiatan sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan berkontribusi dalam meningkatkan hidup masyarakat.

Pada masa sejarah berjuangnya perempuan WNI, ada pelopor termasuk R.A Kartini, Nyi Ageng Serang, dan Dewi Sartika yang berjuang untuk kesetaraan pendidikan bagi perempuan. Selain mereka, ada juga pejuang kemerdekaan seperti Maria Tiahahu, Cut Nyak Dien, dan Yolanda Marinis. Paguyuban perempuan sudah lahir sejak belum merdekanya Indonesia, serta pada 22 Desember 1928 semua tokoh perempuan tersebut mengadakan Kongres I. Saat ini, terdiri dari 66 Perserikatan perempuan yang tergabung dalam Kowani (Kongres Wanita Indonesia).

UU Dasar tepatnya pada tahun 1945 menjamin kesamaan wewenang maupun keharusan baik itu pria serta wanita, termasuk pada bagian politik. Pada tahun 1978, kesetaraan hak ini diperkuat ke dalam Baret-Baret Lebar Haluan Negara. Tanah Indonesia juga menunjukkan komitmen terhadap kesetaraan gender dengan menandatangani Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan pada tahun 1980 dan meratifikasinya pada tahun 1984 melalui UU No. 7 Tahun 1984.

Secara ideologis dan pada konteks HAM, wanita memiliki posisi yang setara pada pria. Mereka berhak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kebebasan berpikir, serta hak-hak lainnya yang dijamin oleh hukum. Artinya, hak perempuan dan laki-laki setara.

Dalam berkeluarga, pria biasanya dianggap menjadi ketua rumah tangga serta wanita sebagai ibu RT. Namun, ada pandangan yang mengatakan bahwa perempuan bisa ikut serta dalam kehidupan masyarakat dan politik selama tidak melanggar hukum syariat. Di ruang sosial yang netral, perempuan memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka dan berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah.

2. Tantangan Partisipasi Politik Perempuan

Partisipasi politik perempuan sering kali dihalangi karena bermacam penyebab, bagus dari dalam atau pun luar diri mereka. Dalam banyak negara, perempuan merasa kurang terwakili di parlemen dan lembaga pembuat kebijakan. Ada dua kelompok utama hambatan yang sering kali dihadapi, yakni halangan internal dan eksternal.

Halangan internal termasuk berkurangnya ingatan di kalangan wanita demi aktif atas berpolitik, mungkin karena norma sosial dan budaya yang menganggap aktivitas politik tidak cocok bagi perempuan. Selain itu, wilayah sosial dan budaya sering tidak menunjang pertumbuhan aktualisasi wanita, seperti pandangan tradisional yang mengharuskan perempuan untuk berada di belakang pria.

Budaya patriarki juga menguatkan persepsi bahwa politik adalah domain laki-laki yang penuh intrik dan kekuasaan, sementara perempuan dianggap lebih cocok untuk urusan domestik dan pendukung.

Di sisi lain, hambatan eksternal meliputi birokrasi yang cenderung paternalistik dan ketidakseimbangan dalam pembangunan ekonomi dan politik, serta lemahnya peran partai politik dalam mendorong partisipasi perempuan. Meskipun telah ada kemajuan dalam hak-hak sipil perempuan seperti kesempatan kerja dan akses terhadap kontrasepsi, hambatan patriarkhal masih sangat memengaruhi kehidupan perempuan, baik dalam keluarga maupun di ranah publik. Perempuan masih mendapatkan sedikit gaji dari para pria serta kesempatan yang sama dalam legislatif. Perempuan dari keluarga tunggal mendapatkan tidak banyak manfaat Negara dan wanita disakiti karena hal-hal yang buruk di masyarakat. Agan Gaffar mengemukakan tantangan dari luar antara lain birokrasi yang paternalistik, kurang berfungsinya partai politik, serta pola pembangunan.

3. Upaya untuk Meningkatkan Peran Perempuan dalam Politik

Usaha meningkatkan peran perempuan dalam politik, diperlukan analisis dan pemikiran yang menyeluruh untuk menghasilkan solusi yang bijaksana.

- 1) Pendidikan pertama anak yaitu melalui keluarga, berkontribusi di ranah politik merupakan hal terpenting dalam mengembangkan bangsa dan negara serta masyarakat.
- 2) Perempuan yang sekolah menengah sampai ke Universitas, sebaiknya didorong agar masuk ke dalam organisasi seperti BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), Organisasi Siswa Sekolah (OSIS), HMJ, Himpunan Mahasiswa Islam, organisasi pemuda seperti PMI, dan organisasi kemasyarakatan seperti NU, Muhammadiyah dan sebagainya. Dengan melakukan hal tersebut, perempuan sudah siap untuk menjadi pemimpin di masa depan. Zaman sekarang, perempuan yang berpartisipasi di dalam politik biasanya adalah orang-orang yang sudah pernah mengikuti organisasi saat sekolah dan kuliah.
- 3) Mempromosikan partisipasi politik kaum perempuan.
- 4) Perempuan dari sekarang dipersiapkan agar terpacu dan tertantang masuk ke dalam ranah politik. Dengan melakukan hal tersebut, maka akan banyaknya wanita yang berkontribusi dan berkecimpung dalam dunia politik di masa depan.
- 5) Memberikan pencerahan, penyadaran dan semangat pada perempuan agar di segala aktivitas berpolitik yaitu berkontribusi pada pemilihan umum, kampanye, menjadi caleg legislatif, calon Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota, Bupati/Wakil Bupati dan lainnya.

Berikut kesempatan untuk perempuan agar bisa mengembangkan kualitasnya dalam peran politik meliputi:

Dalam Pasal 17 dan 21 UUD 1945, GBHN yang sejak tahun 1978, konferensi-konferensi wanita sedunia. Perempuan sebenarnya memiliki

kesempatan besar agar dapat masuk dan berperan ke ranah politik. Walaupun adanya bermanfaat pada perempuan atau tidak ada manfaat. Di zaman orde baru, kesempatan perempuan terbuka agar menjadi pemimpin, tidak lagi menjadi anggota. Terdapat empat sebab memberikan kesempatan pada perempuan agar meningkatnya tugas di ranah politik.

- 1) Jumlah wanita yang lebih berkarir bertambah aware bahwa wanita harus terlandas di era politik untuk mengembangkan Indonesia yang lebih baik. Maju dan aman.
- 2) Arus politik dalam negeri selama Orde Perubahan yang memberikan kuota 30% demi golongan wanita sebagai kandidat anggota legislatif.
- 3) Mengenang bahwa perempuan tanah Indonesia memiliki kapasitas yang sangat luar biasa dibanding pria, sewajarnya lah jika kesempatan ini tidak dimanfaatkan.

Selama kiprahnya menjadi warga negara, perempuan berharap dapat menjadi empunya kualitas bangsa. Mereka ingin mampu bertindak menjadi atasan semangat pelopor, penguasa, serta pendorong demi kemajuan bangsa. Makanya, Perempuan harus mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, *innovation*, serta bermacam keterampilan serta kemampuan di bermacam aspek berkehidupan misal berpolitik, perekonomian, sosialisasi, serta perbudayaan. Demi mengatasi ketidakmampuan yang terkait atas peran mereka pada dunia berpolitik, hal utama yang harus dilakukan ialah melenyapkan perbandingan atas kaum perempuan pada istana berpolitik. Perihal ini sejati pada destinasi perkembangan dalam negara dan sebab perempuan tanah Indonesia ialah separuh komunitas. Makanya, sangat wajar bahwa anggota parlemen memiliki kemampuan untuk menuturkan pendapat berpolitik tersebut.

Sudah waktunya wanita Indonesia mendapatkan porsi yang adil dalam politik. Seharusnya *nothing anymore* perkataan yang membimbing kemampuan mereka demi berpartisipasi dalam berpolitik, jadi perlu ada tindakan untuk mendorong kebijakan pemerintah yang sensitif terhadap gender. Gerakan tersebut harus mencapai keberhasilan dengan memberikan akses wanita ke lembaga pemilihan nasional. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dibuat oleh ketua delegasi Philipina pada konferensi, Senator Leticia Ramos Shahani.

Chris Fletcher, anggota parlemen Selandia Baru, mengungkapkan sesungguhnya Panggung Aksi Konferensi Keempat Perserikatan Bangsa-Bangsa mengupas tentang wanita pada September 1995 harus meminta wewenang untuk mengeliminasi minimalnya 50% bangku pada sebuah badan legislatif demi perempuan tepatnya di tahun 2005. Ini dilakukan mengingat jumlah akses yang masih sangat kecil dan maksimalnya wasangka pada seluruh global yang membendung perempuan untuk dipilih menjadi bagian kelompok sebuah legislatif. Dari perspektif keberanian wanita, perlu adanya kesadaran atas perempuan sesungguhnya relasi sistemis antara pria serta

wanita mesti diubah. Untuk mengubah mentalitas kekuasaan pria ke dalam aksi kaum perempuan, kemitraan sejajaran mesti diciptakan.

Selama bertahun-tahun pada tarikh perpolitikan Indonesia serta negara-negara bertumbuh lainnya, wanita terus dilihat terlambat atas hal keikutsertaan mereka pada era berpolitik. Semenjak pemilihan umum pada tahun 1999, penulis memantau peningkatan penafian wanita untuk menjabat sebagai seorang presiden, terutama setelah satu di antaranya partai mengeluarkan fatwa sesungguhnya presiden pemimpin Amerika Serikat harus beragama Islam. Pada abad yang layak, pemimpin komunitas lain menyatakan sungguh wanita dapat sebagai presiden apabila pria belum bisa mengelola Tanah Indonesia. Meskipun demikian, perihal tersebut sudah *clear* melampaui determinasi yang tercatat di dalam konvensi CEDAW, yang berarti konvensi internasional menyangkut penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan. Di Indonesia, UU No. 7 tahun 1984, khususnya Pasal 7, mengatur hak wanita demi digabungkan dalam pemilu serta berpartisipasi ke dalam pembangunan dan jabatan negara.

Pria memprioritaskan kekayaan, kekuasaan, dan kedigdayaan dalam politik, sementara politik perempuan sederhana dan rutin. Statistik berikut adalah Komposisi para pemegang kebijakan dan tingkil puist (DPRD) Mingya District (DPRD) II menunjukkan bahwa menurut data yang dirilis oleh Biro Pusat Politik (BPS) pada tahun 2000, terdapat 1001.625.816 orang, atau 51% dari seluruh populasi, maupun melebihi banyaknya dari total populasi di ketiga negara: Malaysia, Singapura, dan Filipina. Akan Tetapi, angka yang signifikan tersebut tampaknya tidak melibatkan wanita pada era berpolitik.

Pandangan Ulama tentang Peran Perempuan dalam Politik

Ulama berbeda pendapat tentang peran perempuan dalam politik di antaranya, yaitu: ¹⁶

1. Membolehkan

Sebagian ulama seperti Muhammad Quraish Shihab, Azyumardi azra, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa perempuan boleh berpolitik. Karena perempuan mempunyai hak-hak politik yang sama dengan laki-laki. Pendapat ini didasarkan pada Q.S. At-Taubah [9]: 71. Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan seperti laki-laki, masing-masing mereka boleh berpartisipasi dalam politik dan mengatur urusan masyarakat. Perempuan seperti laki-laki berpartisipasi dalam mengatur kepentingan umum. Allah berfirman, *“Sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.”* Ia punya hak seperti laki-laki dalam menyuruh pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Tidak ada kegiatan-kegiatan kewenangan umum melainkan seperti amar ma’ruf nahi mungkar. Hal itu disempurnakan dengan syariat dan ijtihad dalam mengetahui hukum-hukum dan parsitipasi dan pengadilan dan penyelesaian konflik.

¹⁶ Ummi Kalsum, Skripsi: Peran Perempuan Dalam Politik Menurut Kajian Al-Qur’an, (IAIN Padang Sidempuan, 2018).

Allah SWT berfirman dalam (Q.S. Al-Hujurat [49]: 1)15, (Q.S. An-Nisa [4]: 1) 16 dan (Q.S. Al-Isra [17]: 70) 17. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Islam memuliakan perempuan dan mempersamakannya dengan laki-laki serta menegaskan kesempurnaan kemanusiaannya. Sebagaimana jelas dari ayat-ayat ini bahwa kemuliaan anak-anak manusia berada di atas landasan persamaan, bukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

2. Melarang

Ulama yang mengatakan bahwa perempuan dilarang menggunakan hak-hak politiknya adalah Imam maliki, Muhammad Anis Qasim, serta ulama kontemporer seperti Syaikh Abdullaziz Ban Baz. Menurut mereka Tidak ada persamaan antara perempuan dan laki-laki dalam masalah politik, pendapat ini didasari pada:

- a) Perempuan berbeda dengan laki-laki dalam aspek Fisik, Intelektual dan Moral.
- b) Urusan rumah tangga dan memelihara anak adalah tugas perempuan, sedangkan urusan lain dan kemasyarakatan adalah tugas laki-laki.
- c) Jika perempuan ikut serta dalam dunia politik maka akan membahayakan keluarganya.
- d) Pada umumnya perempuan cenderung terlibat pada politik konservatif dan tradisional.
- e) Perempuan tidak wajib mengikuti tugas wajib militer.
- f) Keikutsertaan perempuan dalam politik, terkadang menjadikan laki-laki kurang menghargainya. Dan sebaliknya perempuan tidak mengutamakan laki-laki

KESIMPULAN

Penjelasan terdapat Q.S. An-Nisa ayat 34, sebagai fitrah pada dasarnya kata pemimpin memang ditujukan kepada kaum laki-laki yang di sini disebut sebagai suami di dalam urusan rumah tangga karena Tuhan memberikan berbagai kelebihan laki-laki melebihi perempuan lalu mewajibkan atas seorang pria untuk menghasilkan pendapatan atas sebagian tujuannya kepada seorang wanita (istri), membimbing mereka dan bertanggung jawab atas rumah tangganya. Pada penjelasan dari Q.S. At-Taubah ayat 71 bahwa *awliya'* atau pimpinan bukan saja diperuntukkan bagi kaum hanya pria saja melalaikan seorang wanita juga dapat mempunyai manfaat dalam bidang itu. Di sini seorang pria dan seorang wanita bersama-sama menguntungkan dan menghasilkan di pemeliharaan, pengasuhan, lalu kekuasaan. Kerja sama antara keduanya ini juga dapat untuk membangun keharmonisan dalam keluarga.

Adanya sejarah mengenai pemimpin-pemimpin perempuan sejak jaman dahulu dalam sejarah peradaban Islam seperti kisah tentang Ratu Balqis dari Negeri Saba' yang memimpin kerajaan besar dan juga memiliki kecerdasan dan sifat yang bijaksana. Juga kisah dari Syajaratud Dur yang merupakan seorang Sultan Mesir pada abad ke-12 masehi yang berjaya menduduki tempat tertinggi dalam pemerintahan ini menunjukkan bahwa perempuan boleh dan bisa memiliki peluang sama dengan untuk menjadi anggota dalam kepemimpinan dalam bidang politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifah, Hazna. (2009). Peran Politik Perempuan dalam Pandangan Islam. *Faizatul Rosyidah Blog*. faizatulrosyidahblog.blogspot.com/2009/05/peran-politik-perempuan-dalam-pandangan.html. Diakses tanggal 05-11-2014.
- Azra, Azyumardi. (2008). Kajian Tematik Al-Qur'an tentang Kemasyarakatan. Angkasa.
- bangbudi.blog.ugm.ac.id/2012/11/23/wanita-dan-kepemimpinan-politik-dalam-islam/. Diakses tanggal 07-11-2014
- Fathurrosyid. (2013). Ratu Balqis dalam Narasi Semiotika Al-Qur'an. *Jurnal Palastren*, 6(2).
- Kalsum, Ummi. (2018). Peran Perempuan dalam Politik Menurut Kajian Al-Qur'an, (Skripsi. IAIN Padang Sidempuan).
- Munggaran, Tegar Putra. (2023). Peran dan Pengaruh Perempuan dalam Dinamika Politik di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(7).
- Priandi, Rizki., & Kholis Roisah. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1).
- Rusnila. (2014). Perempuan Berpolitik dalam Perspektif Islam. *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1(1).
- Rusnila. (n.d.). Perempuan Berpolitik dalam Perspektif Islam. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.
- Sakdiah. (2023). Karakteristik Kepemimpinan Ratu Balqis dalam Al-Qur'an. *Jurnal Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*, 12(2).
- Shihab, M. Quraish. (n.d.). Wawasan Al-Qur'an. Mizan.
- Shihab, Muhammad Quraish. (1996). Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Cet. ke 13. Mizan.
- Susanti, Via. (2019). Model Kepemimpinan Balqis dalam Al-Qur'an. Universitas Muhammadiyah Surakarta.